

Aspek Hukum dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi di Indonesia

Viona Shafa Auliya¹, Yasmirah Mandasari Saragih², Manahap Cerarius Fransiskus Pardosi³, Toga Adi Putra Sinaga⁴, Alza Hamonangan Pasaribu⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

* vionashfa04@gmail.com

Submission:

2025-04-27

Review:

2025-04-28

Accepted:

2025-04-30

Publish:

2025-06-30

ABSTRACT; *The 2030 Agenda for Sustainable Development agreed upon at the UN General Assembly emphasizes the importance of the Sustainable Development Goals (SDGs) as a global framework for sustainable development. In Indonesia, maternal and child health is a key focus, particularly in SDGs 4 and 5, which aim to reduce child mortality and improve maternal health. The high maternal and infant mortality rates in Indonesia, as indicated by the Maternal Mortality Rate (MMR), highlight the low level of public health. The causes of maternal mortality in Indonesia include hemorrhage, infection, and hypertension, which significantly contribute to health issues. The implementation of Law No. 17 of 2023 focuses on improving postpartum and reproductive health services to reduce maternal and infant mortality rates. This article discusses the importance of improving postpartum health services for mothers as a strategic step toward achieving better health outcomes in Indonesia.*

Keywords: *Legal Aspects, Decline, Mortality Rate, Mother and Infant*

PENDAHULUAN

Sesuai tujuan dari agenda pembangunan dunia 2030 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada September 2015, Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi kerangka global dalam pembangunan berkelanjutan berhubungan dengan society 5.0.¹ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional, society 5.0 akan berdampak pada semua aspek kehidupan mulai dari kesehatan, tata kota, transportasi, pertanian, industri, dan pendidikan.

Hal ini berhubungan dengan seluruh isu kesehatan dalam SDGs yang diintegrasikan dalam satu tujuan, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Sustainable Development Goals (SDGs) menempatkan perhatian khusus pada kesehatan ibu dan anak, terutama dalam tujuan 4 dan 5, yaitu menurunkan Angka Kematian Anak dan meningkatkan kesehatan ibu.² Program kesehatan ibu dan anak menjadi sangat krusial, karena dalam konteks pembangunan Indonesia, kesehatan ibu dan anak merupakan elemen yang vital.

Kualitas generasi penerus bangsa sangat bergantung pada kesehatan ibu selama masa kehamilan dan persalinan.³ Pentingnya hal ini terletak pada fakta bahwa kesehatan ibu dan anak adalah investasi untuk kualitas hidup yang berkelanjutan dan merupakan kunci untuk mencapai pembangunan yang lebih maju di masa depan.

Saat ini, salah satu isu kesehatan yang memerlukan perhatian serius adalah angka kematian ibu dan bayi, yang berdampak signifikan pada pembangunan, terutama di sektor kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi indikator kesehatan masyarakat. Peningkatan dalam AKI dan AKB menunjukkan bahwa tingkat kesehatan suatu negara masih rendah.⁴ Menurut WHO (2019), jumlah kematian ibu di dunia mencapai 303.000 jiwa, sementara di ASEAN, AKI adalah 235 per 100.000 kelahiran hidup.⁵ Data dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan bahwa AKI di Indonesia meningkat dari 228 per 100.000 kelahiran hidup antara 2002-2007 menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup pada 2007-2012.⁶

Namun, terjadi penurunan menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun

¹ Sekar Panuluh and Meila Riskia Fitri, "Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia," *Biefing Paper* Vol.2, no. No.1 (2016): hlm.1-25.

² Yeni Herliana Yoshida, Junita Budi Rachman, and Wawan Budi Darmawan, "Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) Tujuan 5 (5.3)," *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* Vol.1, no. No.3 (2022): hlm.153-166.

³ Dhesi Ari Astuti and Elfa Rahmawati Fitri, *Attachment Penentu Kualitas Generasi Edisi 2021* (Deepublish, 2021), hlm.6.

⁴ Indah Nurfazriah et al., "Peningkatan Pengetahuan Kader Tentang Kesehatan Ibu Dan Anak Dalam Upaya Pencegahan AKI Dan AKB Di Desa Citaman," *International Journal of Community Service Learning* Vol.5, no. No.4 (2021): hlm.324-332.

⁵ Marni Marni and Marselinus Laga Nur, "SOSIAL DAN BUDAYA YANG MEMPENGARUHI KEMATIAN IBU DAN ANAK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MADEMANG," *Jurnal Pangan Gizi Dan Kesehatan* Vol.13, no. No.1 (2024): hlm.1-14.

⁶ Sri Sumarmi, "Model Sosio Ekologi Perilaku Kesehatan Dan Pendekatan Continuum of Care Untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu," *The Indonesian Journal of Public Health* Vol.12, no. No.1 (2017): hlm.129-141.

2012-2015, dengan total kematian ibu di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 4.221 kasus.⁷ Penyebab utama kematian ibu di Indonesia pada tahun 2019 meliputi perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, dan gangguan metabolik.⁸ Sekitar 25-50% kematian ibu disebabkan oleh masalah terkait kehamilan, persalinan, dan nifas.⁹

Menurut data Kemenkes RI, salah satu penyebab kematian ibu terbesar adalah perdarahan pasca persalinan dan infeksi masa nifas, yang mencapai 35%.¹⁰ Infeksi ini sering kali berasal dari robekan jalan lahir (Rupture Perineum), yang menjadi tempat masuknya mikroorganisme.¹¹ Perawatan luka perineum yang kurang memadai dapat menyebabkan infeksi yang memperlambat proses penyembuhan. Menurut Profil Data Kesehatan Indonesia, jumlah ibu nifas normal di Indonesia sekitar 4.830.609 orang.¹² Terdapat 2,7 juta kasus luka robekan perineum pada ibu bersalin, dengan 26% di antaranya mengalami penyembuhan lambat, lebih dari 7 hari setelah persalinan; angka ini diperkirakan akan mencapai 6,3 juta pada tahun 2050.¹³

Asuhan masa nifas sangat penting karena merupakan periode kritis bagi ibu dan bayi. Infeksi ini terjadi karena masih banyak ibu yang kurang memahami pentingnya kebersihan jalan lahir, terutama di daerah yang mengalami robekan, serta kebiasaan kurang baik, seperti pantangan makanan (tidak mengkonsumsi makanan kaya protein). Kebiasaan tersebut dapat memperlambat penyembuhan luka perineum dan proses involusi pada ibu pasca persalinan.¹⁴

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu pascapersalinan harus ditingkatkan, hal ini merujuk pada implementasi Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 pasal 54 dalam upaya kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinaan ibu. Hal ini juga mendukung implementasi Undang-Undang nomor 17

⁷ Noor Cholifah et al., "EFEKTIVITAS TERAPI RELAKSASI BENSON TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PRE EKLAMPSIA DALAM KEHAMILAN," *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* Vol.14, no. No.2 (2023): hlm.539-546.

⁸ Santy Irene Putri et al., "Implementasi Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4k) Kaitannya Dengan Penyebab Kematian Maternal," *KOSALA: Jurnal Ilmu Kesehatan* Vol.11, no. No.2 (2023): hlm.93-100.

⁹ Dewi Nurinda Casnuri and Vina Vinanjungsari, "Pendampingan Ibu Hamil Di Puskesmas Kalasan Kabupaten Sleman Yogyakarta," *Jurnal Pengabdian "Dharma Bakti"* Vol.4, no. No.1 (2021).

¹⁰ Nita Dewi Mardiana, Siti Nurrochmah, and Septa Katmawanti, "Hubungan Antara Kunjungan Ibu Hamil, Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan, Dan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Dengan Angka Kematian Ibu (AKI)," *Sport Science and Health* Vol.3, no. No.11 (2021): hlm.845-853.

¹¹ Ratna Malawat and Meilany Laisouw, "Studi Kasus: Pentingnya Asuhan Kebidanan Komprehensif Untuk Mencegah Nyeri Dan Infeksi Perineum Pada Ibu Postpartum," *Jurnal Kebidanan* Vol.2, no. No.2 (2022): hlm.124-134.

¹² Yena Wineini Migang and Cia Aprilianti, "Pengaruh Pemberian Rebusan Daun Gambir Terhadap Penyembuhan Luka Perineum Pada Ibu Post Partum Di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Tumbang Miri: The Effect of Giving Gambir Leaf Decoction on Healing of Perineal Wounds in Postpartum Mothers in the Working Area," in *Jurnal Forum Kesehatan: Media Publikasi Kesehatan Ilmiah*, vol. Vol.14, 2024, hlm.68-76.

¹³ Sri Susilawati, Meti Patimah, and Melsa Sagita Imaniar, "Determinan Percepatan Penyembuhan Luka Perineum Pada Ibu Nifas Dengan Pemberian Konsumsi Ikan Gabus (*Channa Striata*)," *Faletehan Health Journal* Vol.7, no. No.03 (2020): hlm.132-136.

¹⁴ Kristina Maharani, Fery Agusman, and Anita Indra, "Hubungan Kebiasaan Berpantang Makan Dengan Lamanya Penyembuhan Luka Perineum Pada Ibu Nifas Di Bpm WILAYAH DESA KEBONBATUR," *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* Vol.2, no. No.2 (2015).

tahun 2023 yaitu pada pasal 63 Upaya Kesehatan keluarga berencana ditujukan untuk mengatur kehamilan, membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi untuk Indonesia sehat dan sejahtera.

Dalam konteks ini, UU Nomor 17 Tahun 2023 dihadirkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu pascapersalinan. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ibu mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, baik selama proses persalinan maupun setelahnya. Dengan penekanan pada pelayanan pascapersalinan, diharapkan dapat mengurangi risiko komplikasi yang dapat mengancam nyawa ibu dan bayi.¹⁵

UU ini juga mencakup berbagai inisiatif, termasuk peningkatan pelatihan bagi tenaga kesehatan, penguatan fasilitas kesehatan, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya perawatan kesehatan pascapersalinan. Namun, implementasi dari undang-undang ini memerlukan pemantauan dan evaluasi yang cermat untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan dapat tercapai secara efektif.¹⁶ Dengan memahami urgensi dan tantangan dalam implementasi UU Nomor 17 Tahun 2023, artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek dari undang-undang tersebut serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu pascapersalinan di Indonesia.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan pihak terkait dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Artikel ini membahas mengenai pentingnya Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Ibu Pascapersalinan dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Indonesia dengan mengimplementasikan UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam menyusun artikel ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur pengetahuan dan teori dasar penelitian melalui identifikasi dan evaluasi, serta sintesis dari berbagai karya penelitian.¹⁷ Dalam metode ini, peneliti akan mengumpulkan berbagai informasi terkait dengan topik yang dipilih menggunakan data yang tidak diperoleh langsung dari peneliti (data sekunder).

Data sekunder yang diperlukan akan berasal dari berbagai artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik yang ditentukan, yaitu mengenai tele-dentistry, yang saat ini merupakan bentuk layanan kesehatan di Indonesia, ditinjau dengan aspek hukum yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan memeriksa teori, konsep, prinsip hukum, dan peraturan perundang-

¹⁵ Nur Anita et al., *Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan Dan Menyusui: Konsep, Faktor, Dan Tantangan* (Kaizen Media Publishing, 2023), hlm.14.

¹⁶ Irfan Setiawan, *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek* (CV. Rtujuh Media Printing, 2024), hlm.15.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," *Jakarta: Kencana Prenada Media* 55 (2005): hlm.14.

undangan yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan bibliografi, yaitu dengan mempelajari buku, undang-undang, peraturan, dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam hukum normatif dilakukan dengan cara penelitian perpustakaan terhadap bahan hukum. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Penulis menganalisis undang-undang yang ada dan analisis konseptual atau yang terkait dengan judul tulisan untuk membandingkannya dengan peraturan lain. Informasi yang diperlukan diperoleh melalui beberapa media, seperti Google, Google Scholar, Scopus, dan ResearchGate dengan kata kunci, yaitu “AKI, AKB, UU Nomor 17 Tahun 2023, SDGS, Pascapersalihan”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi di Indonesia

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang bersifat individual, dimana hal ini telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, berhak mendapat tempat tinggal, berhak mendapat penghidupan yang baik dan sehat. Lingkungan hidup dan hak untuk menerima pelayanan kesehatan. Angka kematian ibu dan bayi merupakan indikator penting dalam menilai kualitas sistem kesehatan suatu negara.¹⁸ Di Indonesia, masalah ini masih menjadi tantangan serius, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkannya.

Menurut data Kementerian Kesehatan, angka kematian ibu mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup, sementara angka kematian bayi juga menunjukkan angka yang memprihatinkan.¹⁹ Faktor-faktor seperti akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan, kurangnya pengetahuan mengenai perawatan pascapersalihan, dan keterbatasan infrastruktur kesehatan menjadi penyebab utama tingginya angka kematian tersebut.²⁰

Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator utama dalam menilai kualitas layanan kesehatan di suatu negara. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menurunkan angka-angka ini. Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi akses terbatas terhadap layanan kesehatan, ketidakcukupan fasilitas medis, serta kurangnya pengetahuan tentang perawatan kesehatan pascapersalihan.²¹

Pelayanan kesehatan pascapersalihan sangat penting untuk mencegah komplikasi dan mengurangi risiko kematian. Perawatan yang memadai setelah melahirkan dapat mencegah banyak masalah kesehatan, termasuk infeksi dan komplikasi yang bisa

¹⁸ Sumarmi, “Model Sosio Ekologi Perilaku Kesehatan Dan Pendekatan Continuum of Care Untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu.”

¹⁹ Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat and REPUBLIK INDONESIA, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak,” in *Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat*, 2021.

²⁰ Syntya Juli Prasetyo and Sunu Wahyu, “Analisis Determinan Angka Kematian Ibu Dan Strategi Peningkatan Kesehatan Maternal Di Kabupaten Grobogan,” *Jurnal Paradigma Grobogan* Vol.2, no. No.1 (2025): hlm.143-158.

²¹ *Ibid.*

mengancam nyawa.²² Penelitian menunjukkan bahwa intervensi dini dan dukungan kesehatan mental juga memainkan peran penting dalam kesehatan ibu.²³

Tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih menjadi perhatian utama, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan. Hasil penelitian Roesli dan Budi²⁴ menunjukkan bahwa akses yang tidak merata terhadap layanan kesehatan di daerah pedesaan berkontribusi besar terhadap masalah ini. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan infrastruktur kesehatan di wilayah terpencil serta program mobilisasi yang memudahkan akses ke fasilitas kesehatan.

Sari menegaskan bahwa pelayanan pascapersalinan yang baik sangat penting dalam mencegah komplikasi kesehatan.²⁵ Namun, banyak ibu yang tidak menerima perawatan yang memadai setelah melahirkan, baik karena kurangnya fasilitas maupun kurangnya pemahaman mengenai pentingnya perawatan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kampanye penyuluhan dan edukasi yang menyeluruh, agar ibu memahami pentingnya kontrol pascapersalinan dan dapat mengakses layanan yang ada.

UU Nomor 17 Tahun 2023 berpotensi menjadi pendorong perubahan positif dalam sistem kesehatan. Halim dan Setiawan mencatat bahwa peningkatan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan penyuluhan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan.²⁶ Namun, implementasi yang efektif memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Widiyanto menekankan pentingnya evaluasi berkala dalam implementasi kebijakan kesehatan.²⁷

Tanpa monitoring yang tepat, berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan program mungkin tidak teridentifikasi, menghambat upaya penurunan angka kematian. Oleh karena itu, mekanisme evaluasi yang transparan dan sistematis harus dibangun untuk menilai efektivitas program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Kebijakan Kesehatan Di Indonesia Dalam Mengurangi Angka Kematian Ibu Dan Bayi

Hukum adalah kerangka regulasi yang mengatur aktivitas dan tanggung jawab para penyelenggara praktik.²⁸ Hukum adalah seperangkat peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dibuat oleh penguasa yang berwenang, bersifat mengatur dan/atau

²² Ita Nur Itsna et al., *Asuhan Keperawatan Maternitas* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm.33.

²³ Bina Melvia Girsang et al., *Layanan Kesehatan n Pascapersalinan Intervensi Praktik Di Komunitas* (Azzia Karya Bersama, 2025), hlm.22.

²⁴ A. Roesli, R., & Budi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kematian Ibu Di Indonesia.," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol.15, no. No.2 (2021): hlm.123-130.

²⁵ Besse Sari Angraeni, "PERLINDUNGAN HUKUM BIDAN YANG MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN DARURAT DI LUAR DARI KEWENANGAN" (Universitas Hasanuddin, 2023).

²⁶ T. Halim, E., & Setiawan, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Kesehatan Ibu Pasca Persalinan Di Indonesia.," *Jurnal Kebijakan Kesehatan* Vol.10, no. No.3 (2023): hlm.75-85.

²⁷ J. Widiyanto, A., Pramono, P., & Santosa, "Monitoring and Evaluation in Health Policy Implementation.," *Jurnal Manajemen Kesehatan* Vol.8, no. No.2 (2022): hlm.100-110.

²⁸ Andoko. Suharni S., Saragih M Y., *Perlindungan Hukum Bagi Penyelenggara Praktik Kefarmasian. K-Media. Bantul*, 2024, hlm.21.

memaksa, memuat sanksi bagi yang melanggarnya, ditujukan pada perilaku manusia yang bertujuan untuk mencapai tujuan untuk menjamin kehidupan yang baik.²⁹

Individu dan masyarakat mendapat jaminan ketertiban dan keamanan. Tujuan hukum sendiri adalah untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat dari perbuatan seseorang yang dapat merugikan hak dan kepentingan tersebut, dengan cara melaksanakan kewajiban pihak lain. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah pemberian perlindungan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan tersebut ditujukan bagi seluruh masyarakat.³⁰

Oleh karena itu, sejalan dengan undang-undang yang diatur dalam RUU Kesehatan Omnibus Law, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 193 tentang kesehatan yang artinya Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum atas segala kerugian yang timbul akibat kelalaian yang dituduhkan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit. Hal ini juga terkait dengan sanksi administratif yang dapat diperoleh kepada tenaga medis apabila setelah mengkaji fakta ditemukan bukti bahwa tenaga medis telah melakukan pelanggaran teledentistry sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang berlaku.

UU Nomor 17 Tahun 2023 diharapkan menjadi solusi strategis untuk meningkatkan layanan kesehatan ibu. Dalam kajian oleh Halim & Setiawan, disebutkan bahwa undang-undang ini tidak hanya fokus pada peningkatan fasilitas, tetapi juga pada pelatihan tenaga kesehatan dan penyuluhan kepada masyarakat.³¹ Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya perawatan kesehatan pascapersalinan. Implementasi kebijakan kesehatan perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.

Penelitian oleh Widiyanto et al. menunjukkan bahwa monitoring yang baik dapat membantu mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan program, memungkinkan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.³²

Tinjauan literatur mengenai implementasi UU Nomor 17 Tahun 2023 dan peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu pascapersalinan menunjukkan beberapa temuan kunci yang dapat memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan dan peluang dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Berdasarkan berbagai studi, angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih tinggi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti akses terbatas ke layanan kesehatan dan pengetahuan yang kurang memadai mengenai perawatan pascapersalinan. Roesli dan Budi menyoroti bahwa akses yang tidak merata ke fasilitas kesehatan, terutama di daerah pedesaan, menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kematian.³³

Penelitian menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas selama periode

²⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022), hlm.23.

³⁰ Agustinus Sihombing, *Hukum Perlindungan Konsumen* (CV. Azka Pustaka, 2023), hlm.17.

³¹ Halim, E., & Setiawan, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Kesehatan Ibu Pasca Persalinan Di Indonesia."

³² Widiyanto, A., Pramono, P., & Santosa, "Monitoring and Evaluation in Health Policy Implementation."

³³ Roesli, R., & Budi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kematian Ibu Di Indonesia."

pascapersalinan sangat penting dalam mencegah komplikasi yang dapat mengancam nyawa. Sari menyatakan bahwa intervensi yang tepat dalam masa pascapersalinan dapat mengurangi risiko infeksi dan masalah kesehatan lainnya, yang sering kali berkontribusi terhadap kematian ibu dan bayi.³⁴

UU Nomor 17 Tahun 2023 berfokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui pelatihan tenaga kesehatan, penguatan fasilitas, dan penyuluhan masyarakat. Halim dan Setiawan menggarisbawahi bahwa undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan ibu pascapersalinan.³⁵ Dengan adanya pelatihan dan peningkatan fasilitas, diharapkan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

Evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan sangat penting untuk memastikan efektivitasnya. Widiyanto et al. menemukan bahwa mekanisme monitoring yang baik dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan program dan memberikan umpan balik untuk perbaikan.³⁶

Hal ini menunjukkan bahwa tanpa evaluasi yang sistematis, upaya peningkatan pelayanan kesehatan dapat kurang optimal. Hasil dari tinjauan literatur menunjukkan bahwa meskipun UU Nomor 17 Tahun 2023 menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu pascapersalinan, tantangan yang ada seperti akses terbatas dan kebutuhan akan edukasi kesehatan tetap harus diatasi. Dengan pelatihan yang tepat dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia dapat menurun secara signifikan.

KESIMPULAN

Implementasi UU Nomor 17 Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu pascapersalinan dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Meskipun undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memperbaiki layanan kesehatan, tantangan yang ada, seperti akses yang tidak merata, kurangnya pemahaman masyarakat, dan keterbatasan fasilitas kesehatan, masih perlu diatasi. Pelayanan kesehatan yang berkualitas selama periode pascapersalinan sangat penting dalam mencegah komplikasi yang dapat mengancam nyawa ibu dan bayi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi undang-undang ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Pemerintah harus berinvestasi dalam pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil, untuk memastikan akses yang lebih baik bagi ibu hamil dan pascapersalinan. Kemudian, melaksanakan program edukasi yang komprehensif untuk masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan pascapersalinan. Penyuluhan harus menjangkau komunitas dan menggunakan berbagai metode komunikasi untuk meningkatkan kesadaran. Mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan mengenai praktik terbaik dalam perawatan ibu dan bayi, serta meningkatkan keterampilan dalam manajemen komplikasi pascapersalinan.

³⁴ Sari Angraeni, "PERLINDUNGAN HUKUM BIDAN YANG MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN DARURAT DI LUAR DARI KEWENANGAN."

³⁵ Halim, E., & Setiawan, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Kesehatan Ibu Pasca Persalinan Di Indonesia."

³⁶ Widiyanto, A., Pramono, P., & Santosa, "Monitoring and Evaluation in Health Policy Implementation."

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2022.
- Anita, Nur, S ST, S Raehan, M Keb, Ratih Sakti Prastiwi, S ST, Lulu Mamlukah Rosmayanti, S Tr Keb, M HKes, and Masruroh S SiT. *Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan Dan Menyusui: Konsep, Faktor, Dan Tantangan*. Kaizen Media Publishing, 2023.
- Astuti, Dhesi Ari, and Elfa Rahmawati Fitri. *Attachment Penentu Kualitas Generasi Edisi 2021*. Deepublish, 2021.
- Casnuri, Dewi Nurinda, and Vina Vinanjungsari. "Pendampingan Ibu Hamil Di Puskesmas Kalasan Kabupaten Sleman Yogyakarta." *Jurnal Pengabdian "Dharma Bakti "Vol 4, no. No.1 (2021)*.
- Cholifah, Noor, Fitirana Zuni Astutik, Diah Andriani, and Edita Pusparatri. "EFEKTIVITAS TERAPI RELAKSASI BENSON TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PRE EKLAMPSIA DALAM KEHAMILAN." *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan Vol.14, no. No.2 (2023): hlm.539-546*.
- Girsang, Bina Melvia, Susi Amenta Beru Perangin-Angin, Diah Lestari Nasution, and Farida Linda Sari Siregar. *Layanan Kesehatan n Pascapersalinan Intervensi Praktik Di Komunitas*. Azzia Karya Bersama, 2025.
- Halim, E., & Setiawan, T. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Kesehatan Ibu Pasca Persalinan Di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Vol.10, no. No.3 (2023): hlm.75-85*.
- Itsna, Ita Nur, Ratna Widhiastuti, Jelita Siska Herlina Hinonaung, and Nurhayati Nurhayati. *Asuhan Keperawatan Maternitas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Maharani, Kristina, Fery Agusman, and Anita Indra. "Hubungan Kebiasaan Berpantang Makan Dengan Lamanya Penyembuhan Luka Perineum Pada Ibu Nifas Di Bpm WILAYAH DESA KEBONBATUR." *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan Vol.2, no. No.2 (2015)*.
- Mahmud Marzuki, Peter. "Penelitian Hukum." *Jakarta: Kencana Prenada Media 55 (2005)*.
- Malawat, Ratna, and Meilany Laisouw. "Studi Kasus: Pentingnya Asuhan Kebidanan Komprehensif Untuk Mencegah Nyeri Dan Infeksi Perineum Pada Ibu Postpartum." *Jurnal Kebidanan Vol.2, no. No.2 (2022): hlm.124-134*.
- Mardiana, Nita Dewi, Siti Nurrochmah, and Septa Katmawanti. "Hubungan Antara Kunjungan Ibu Hamil, Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan, Dan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Dengan Angka Kematian Ibu (AKI)." *Sport Science and Health Vol.3, no. No.11 (2021): hlm.845-853*.
- Marni, Marni, and Marselinus Laga Nur. "SOSIAL DAN BUDAYA YANG MEMPENGARUHI KEMATIAN IBU DAN ANAK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MADEMANG." *Jurnal Pangan Gizi Dan Kesehatan Vol.13, no. No.1 (2024): hlm.1-14*.
- Migang, Yena Wineini, and Cia Aprilianti. "Pengaruh Pemberian Rebusan Daun Gambir Terhadap Penyembuhan Luka Perineum Pada Ibu Post Partum Di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Tumbang Miri: The Effect of Giving Gambir Leaf Decoction on Healing of Perineal Wounds in Postpartum Mothers in the Working Area." In *Jurnal Forum Kesehatan: Media Publikasi Kesehatan Ilmiah, Vol.14:hlm.68-76, 2024*.
- Nurfazriah, Indah, Annisa Nurhayati Hidayat, Rina Kartikasari, and Duan Yusuffina. "Peningkatan Pengetahuan Kader Tentang Kesehatan Ibu Dan Anak Dalam Upaya Pencegahan AKI Dan AKB Di Desa Citaman." *International Journal of Community*

- Service Learning* Vol.5, no. No.4 (2021): hlm.324-332.
- Panuluh, Sekar, and Meila Riskia Fitri. "Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia." *Biefing Paper* Vol.2, no. No.1 (2016): hlm.1-25.
- Prasetyo, Syntya Juli, and Sunu Wahyu. "Analisis Determinan Angka Kematian Ibu Dan Strategi Peningkatan Kesehatan Maternal Di Kabupaten Grobogan." *Jurnal Paradigma Grobogan* Vol.2, no. No.1 (2025): hlm.143-158.
- Putri, Santy Irene, Astri Yunita, Hendra Dwi Kurniawan, and Aris Widiyanto. "Implementasi Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4k) Kaitannya Dengan Penyebab Kematian Maternal." *KOSALA: Jurnal Ilmu Kesehatan* Vol.11, no. No.2 (2023): hlm.93-100.
- Rakyat, Badan Keahlian Dewan Perwakilan, and REPUBLIK INDONESIA. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak." In *Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat*, 2021.
- Roesli, R., & Budi, A. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kematian Ibu Di Indonesia." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol.15, no. No.2 (2021): hlm.123-130.
- Sari Angraeni, Besse. "PERLINDUNGAN HUKUM BIDAN YANG MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN DARURAT DI LUAR DARI KEWENANGAN." Universitas Hasanuddin, 2023.
- Setiawan, Irfan. *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*. CV. Rtujuh Media Printing, 2024.
- Sihombing, Agustinus. *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka, 2023.
- Suharni S., Saragih M Y., Andoko. *Perlindungan Hukum Bagi Penyelenggara Praktik Kefarmasian. K-Media. Bantul*, 2024.
- Sumarmi, Sri. "Model Sosio Ekologi Perilaku Kesehatan Dan Pendekatan Continuum of Care Untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu." *The Indonesian Journal of Public Health* Vol.12, no. No.1 (2017): hlm.129-141.
- Susilawati, Sri, Meti Patimah, and Melsa Sagita Imaniar. "Determinan Percepatan Penyembuhan Luka Perineum Pada Ibu Nifas Dengan Pemberian Konsumsi Ikan Gabus (*Channa Striata*)." *Faletahan Health Journal* Vol.7, no. No.03 (2020): hlm.132-136.
- Widianto, A., Pramono, P., & Santosa, J. "Monitoring and Evaluation in Health Policy Implementation." *Jurnal Manajemen Kesehatan* Vol.8, no. No.2 (2022): hlm.100-110.
- Yoshida, Yeni Herliana, Junita Budi Rachman, and Wawan Budi Darmawan. "Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) Tujuan 5 (5.3)." *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* Vol.1, no. No.3 (2022): hlm.153-166.